

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan instansi pelaksana Pemerintah Aceh dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. DPMPTSP memiliki cakupan tugas yang luas, meliputi perencanaan, promosi, pengembangan, pengendalian, serta pengelolaan data dan informasi penanaman modal, termasuk pelayanan perizinan dan nonperizinan kategori A, B, dan C. Selain itu, dinas ini juga menangani pengaduan, kebijakan, dan pelaporan. Kantor DPMPTSP Provinsi Aceh berlokasi di Jalan T. Imum, Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh.

DPMPTSP memainkan peranan strategis dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan iklim investasi, dinas ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan usaha yang kondusif. Hal tersebut berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan. Seiring meningkatnya aktivitas perekonomian, intensitas kerja serta aktivitas karyawan di lingkungan DPMPTSP pun turut meningkat.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1, kantor DPMPTSP dikategorikan sebagai kantor pelayanan publik, yaitu institusi yang menyediakan layanan administratif, barang, dan jasa kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun sebagian besar layanan telah terdigitalisasi dan dapat diakses secara daring, kehadiran layanan luring tetap diperlukan guna menjangkau kelompok masyarakat yang belum memiliki akses atau pemahaman memadai terhadap teknologi. Namun demikian, sarana dan prasarana penunjang dalam kantor pelayanan publik, seperti fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi, ruang kebugaran, serta ruang bermain anak, masih belum memenuhi standar representatif.

Kantor DPMPTSP Provinsi Aceh terdiri atas lima lantai dengan pembagian fungsi ruang yang berbeda. Ruang-ruang pelayanan publik hanya dapat diakses oleh masyarakat umum pada lantai 1 dan lantai 4. Adapun lantai 2, 3, dan 5 diperuntukkan khusus bagi aktivitas internal pegawai. Pada lantai 4, fasilitas publik yang tersedia meliputi ruang kebugaran dan aula. Ruang aula juga difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan rapat bersama investor serta dapat disewakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Saat ini, tata ruang kantor DPMPTSP Aceh mengadopsi sistem group office, yaitu pembagian ruang berdasarkan bidang kerja yang berbeda. Meskipun sistem ini diterapkan secara menyeluruh, hasil observasi menunjukkan bahwa perencanaan ruang belum mempertimbangkan hubungan fungsional antar bidang kerja secara optimal. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam mobilitas antar unit, penempatan ruang yang tidak mendukung alur kerja yang logis, serta posisi ruang privat yang berada di tengah jalur sirkulasi utama, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dan privasi bagi pengguna ruang. Hal ini berhubungan erat dengan sistem ergonomi makro dimana berfokus pada sistem kerja dan organisasi secara keseluruhan.

Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa tata ruang pada kantor DPMPTSP Aceh belum sepenuhnya optimal. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan ruang tunggu yang menyebabkan penumpukan pengguna ruang di area yang tidak semestinya. Oleh karena itu, perancangan ulang ruang kantor perlu memperhatikan aspek kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, seperti penyediaan pantry sebagai ruang istirahat, serta ruang khusus bagi tenaga kerja kontrak seperti sopir, petugas kebersihan, dan office boy yang tidak memerlukan meja kerja tetapi tetap membutuhkan ruang penyimpanan.

Perancangan ulang tata ruang kantor DPMPTSP Aceh direncanakan dengan pendekatan makro ergonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai secara menyeluruh. Ruang kerja dirancang agar mampu memenuhi kebutuhan fungsional, memberikan rasa aman, menjamin privasi, memperkuat identitas personal, serta memfasilitasi interaksi sosial. Hal ini penting

mengingat lingkungan fisik ruang kerja berpengaruh signifikan terhadap perilaku, emosi, dan kesehatan mental pengguna. Dengan peningkatan kualitas lingkungan kerja, diharapkan kinerja instansi meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil survey Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan permasalahan zoning:
 - a. Ruang bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan berada di pojok sehingga mempersulit alur dari bidang pelayanan dan perizinan A dan B.
 - b. Letak ruangan bidang promosi penanaman modal dan bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal yang berjauhan, dimana kedua ruang tersebut harus berdekatan akibat dari jobdesk yang bersangkutan.
 - c. Ruang kabid merupakan ruangan dengan keprivasian tinggi dimana hanya dapat diakses oleh beberapa kabid yang bertanggung jawab atas bidangnya. Kepala bidang juga menandakan kepemimpinan pada dinas ini.
 - d. Ruang sekretaris yang memiliki tingkat keprivasian yang tinggi, tetapi berada di depan tangga yang merupakan alur sirkulasi vertikal pada gedung sehingga dilalui banyak orang.
 - e. Ruang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan ruangan dengan keprivasian tinggi karena bertugas untuk mengelola dan menyimpan rahasia. Data yang dikelola dan disimpan merupakan data soft file. Kebocoran data bisa melalui peretasan yang dilakukan secara online. Dalam hal penataan ruang, meletakkan ruang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di zoning privasi bertujuan untuk mengurangi akses umum ke bidang tersebut yang ditakutkan dapat mengakses data dengan mudah.

2. Berdasarkan permasalahan ruang:
 - a. Penempatan akses pintu yang tidak efisien sehingga menyebabkan alur aksesibilitas yang menyulitkan pengguna ruang akibat sirkulasi yang memutar.
 - b. Luas ruang eselon III (Kepala bidang) yang berbeda dan tidak memenuhi standar luas ruangan minimal menurut Perpres Nomor 73 Tahun 2011.
 - c. Ruang laktasi yang sempit dan tidak memenuhi standar JDIH Kementerian PUPR.
3. Berdasarkan permasalahan fasilitas ruang kerja:
 - a. Tidak adanya ruang menunggu rapat di depan ruang rapat yang mengakibatkan penumpukan pengguna ruang area yang tidak terorganisir ketika menunggu giliran rapat.
 - b. Penumpukan pengguna ruang pada lantai 4 akibat tidak adanya ruang tunggu di depan aula ketika sedang menunggu kegiatan dimulai.
4. Berdasarkan aktivitas pengguna:
 - a. Bidang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan bidang yang menyimpan data, sehingga ruang bidang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) harus lebih privasi.
 - b. Dibutuhkannya aula serba guna yang dapat menunjang kegiatan tambahan, seperti halal bihalal setelah bulan ramadhan dilengkapi dengan kegiatan makan bersama.
5. Berdasarkan permasalahan teknis:
 - a. Pencahayaan minim yang tidak memenuhi standar.
6. Berdasarkan permasalahan fasilitas penunjang:
 - a. Tidak adanya pantry untuk mendukung produktivitas karyawan.
 - b. Tidak adanya ruang karyawan dan loker untuk tenaga kontrak (supir, cleaning service, office boy).
 - c. Tidak terpenuhinya standar fasilitas disabilitas pada ruang publik yang menyulitkan pengguna ruang dengan kebutuhan yang berbeda.
 - d. Fasilitas penunjang seperti area bermain anak, laktasi dan fitness yang

tidak memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dihasilkan rumusan masalah pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Bagaimana pemilihan sistem tata letak ruang yang berdasarkan kebutuhan setiap bidang sesuai dengan alur hubungan kerja per bidang?
2. Bagaimana perancangan sirkulasi ruang yang efisien dan tetap menjaga keprivasian pengguna?
3. Fasilitas apa saja yang perlu ditambah dan diperbaiki pada bangunan kantor untuk memudahkan pengguna dan mensejahterakan pegawai?
4. Bagaimana menerapkan pendekatan psikologi pada perancangan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh?

1.4 Tujuan dan Sasaran Perancangan

1.4.1 Tujuan Perancangan

Merancang ulang kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh dengan pendekatan psikologi agar meningkatkan produktivitas kerja, efisien, memudahkan pengguna ruang, mengurangi tingkat miskomunikasi dan memenuhi hak pengguna ruang.

1.4.2 Sasaran Perancangan

Sasaran perancangan dari rancangan ulang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh ini adalah:

1. Merancang zoning yang sesuai dengan jobdesk antar bidang agar menciptakan sirkulasi yang lebih efisien.
2. Merancang zoning yang sesuai dengan tingkat keprivasian pengguna

ruang agar keprivasian tetap terjaga.

3. Merancang kantor dengan layout yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ruang agar tercipta ruang yang lebih efisien dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Merancang bangunan dengan memaksimalkan fasilitas untuk memenuhi hak dan mensejahterakan pegawai.

1.5 Batasan Perancangan

Perancangan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh ini merupakan perancangan ulang dimana hanya merancang ulang bagian dalam (interior) bangunan tanpa merubah fasad bangunan. Proyek ini berada di Jl. T. Imum, Cot Mesjid, Lueng Bata, Banda Aceh, Aceh. Luas bangunan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh adalah 4352.58 m² dengan total 5 lantai.

Batasan perancangan ini seluas 2.049 m² dengan fasilitas ruang yang akan dirancang adalah sebagai berikut:

Lantai 2

1. Lobby
2. Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan
3. Bidang pelayanan, perizinan dan non perizinan A
4. Bidang pelayanan, perizinan dan non perizinan B
5. Bidang pelayanan, perizinan dan non perizinan C
6. Ruang rapat
7. Ruang tunggu rapat
8. Pantry
9. Gudang

Lantai 3

1. Lobby
2. Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal

3. Bidang promosi penanaman modal
 4. Ruang rapat bidang perencanaan dan bidang promosi
 5. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 6. Sub-bagian program
 7. Ruang rapat
 8. Ruang tunggu rapat
 9. Ruang karyawan
 10. Pantry
 11. Gudang
- Pada perancangan ini juga dilakukan perombakan zoning dan blocking dan penambahan fasilitas ruang yang melibatkan seluruh bangunan.

Lantai 4

1. Ruang staff bagian umum
2. Ruang Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)
3. Ruang tunggu aula
4. Ruang fitness

Pada perancangan ini juga dilakukan perombakan zoning dan blocking dan penambahan fasilitas ruang yang melibatkan seluruh bangunan. Perancangan ulang Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh ini difokuskan pada pengembangan konsep desain interior dengan pendekatan psikologis. Perancangan ini bersifat konseptual dan visual, sehingga hasil akhir berupa representasi desain dalam bentuk gambar dua dimensi, tiga dimensi, serta narasi konsep, tanpa dilakukan implementasi secara fisik atau realisasi dalam skala 1:1. Oleh karena itu, perancangan ini tidak mencakup aspek teknis konstruksi detail, penganggaran riil proyek, maupun pelaksanaan pembangunan secara langsung di lokasi kantor yang sebenarnya.

1.6 Manfaat Perancangan

Manfaat perancangan ulang kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh ini adalah:

a. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan pelayanan dengan fasilitas yang memadai kepada masyarakat yang ingin mengajukan perizinan dan penanaman modal di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh.

b. Manfaat bagi karyawan

Memberikan kenyamanan serta bekerja dengan lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas karyawan.

c. Manfaat bagi keilmuan interior

Manfaat bagi keilmuan interior adalah menjadi referensi apabila akan mendesain ulang kantor pemerintahan khususnya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan memperhatikan jobdesk dari masing-masing bidang.

1.7 Metode Perancangan

1.7.1 Isu dan Fenomena

Perkembangan zaman membuat sistem layout pada ruang kantor berkembang dari waktu ke waktu. Namun, perbedaan tugas dan kepentingan tiap divisi menjadikan tidak semua layout ruangan kantor dapat disamakan. Kantor juga dinilai kurang memperhatikan fasilitas yang membuat produktivitas karyawan menurun.

1.7.2 Tahap pengumpulan data

1.7.2.1 Observasi

Observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh secara langsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi kantor dan alur aktivitas pengguna ruang.

Adapun hasil dari observasi adalah permasalahan berupa alur sirkulasi yang tidak efisien, fasilitas yang kurang memadai, dan letak ruangan yang tidak sesuai dengan tingkat keprivasian pengguna ruang. Proses observasi juga dilakukan pada objek studi banding.

1.7.2.2 Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi dilakukan pada saat observasi dengan mengunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh secara langsung dan objek studi banding pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Dokumentasi dapat menjadi bukti kondisi kantor dan melihat permasalahan dari segi visual.

1.7.2.3 Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada beberapa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang dialami oleh pengguna ruang.

1.7.2.4 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan melalui sumber yang memiliki keterkaitan dengan perancangan kantor. Studi literatur yang dilakukan bersumber antara lain dari Permenpan Nomor 48 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Perkantoran, Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, Arsitektur by Francis DK Ching, Neufert Architects Data, Human Dimension, SNI 6197:2020, dan JDIH Kementerian PUPR.

1.7.3 Studi Banding

Studi banding dilakukan pada tiga objek, yaitu kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung. Alasan memilih tiga objek studi banding tersebut adalah objek tersebut merupakan jenis intansi yang sama sehingga bagian, pengguna ruang, dan aktivitas yang dilakukan juga sama.

1.7.4 Analisa Data

Dari pengumpulan data lapangan dan data literatur, data tersebut akan dianalisa hingga menemukan permasalahan yang akan dirancang. Hasil akhir dari analisis data ini adalah solusi perancangan yang akan diimplementasikan dalam proses desain. Tahapan ini berisi pengolahan data hasil survey, wawancara, dokumentasi, studi literatur, dan penelitian terdahulu.

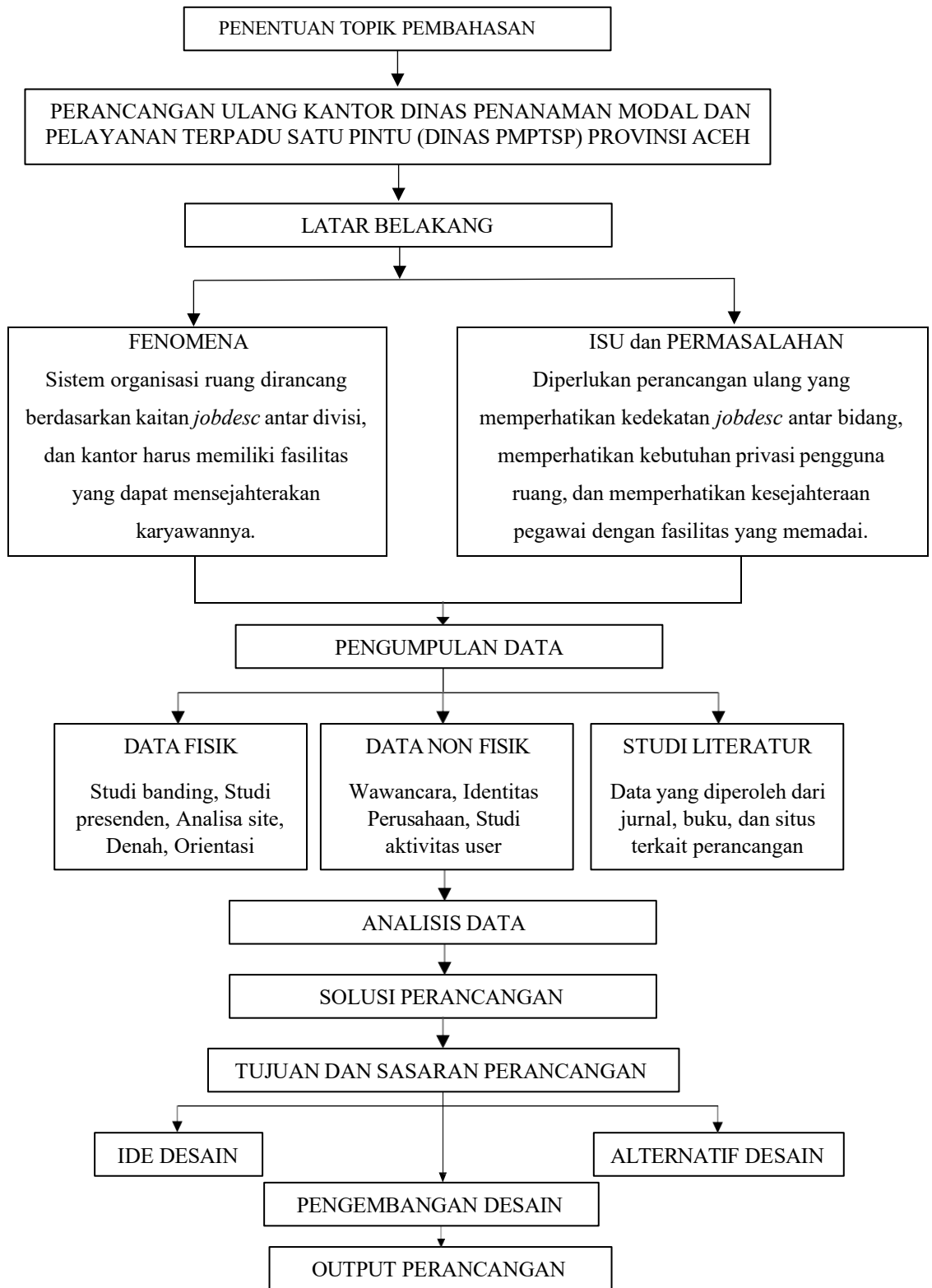
1.7.5 Programming

Tahap *programming* berisi pemecahan masalah yang didasari oleh data yang sudah diperoleh untuk membentuk konsep perancangan. Tahapan ini akan menghasilkan hubungan antar pengguna ruang, kebutuhan pengguna ruang, sifat ruang, zoning, blocking, tema dan konsep perancangan untuk pemecahan masalah perancangan ulang kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh ini.

1.7.6 Hasil Akhir Perancangan

Hasil akhir perancangan ini berupa hasil desain dalam bentuk 2D dan 3D. Hasil akhir berupa laporan, lembar kerja, portofolio, dan video animasi desain.

1.8 Kerangka Berfikir



1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada laporan ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

BAB 2: KAJIAN PUSTAKA DAN REFERENSI DESAIN

BAB 3: DESKRIPSI PROJEK DAN DATA ANALISIS

BAB 4: TEMA DAN KONSEP IMPLEMENTASI PERANCANGAN

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN